

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Kehidupan ekonomi dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari lembaga keuangan khususnya perbankan. Melalui lembaga keuangan ini, dana yang terdapat pada masyarakat dapat disalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang produktif, sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan baik.<sup>1</sup> Tugas utama perbankan diantaranya adalah sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat, serta penyedia dana bagi masyarakat dalam lingkup dunia usaha.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan secara garis besar dapat dikelompokkan kepada dua bagian yakni, lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Dalam lembaga keuangan syariah yang selanjutnya disebut LKS, memiliki aturan-aturan yang lebih khusus dibanding lembaga keuangan konvensional. Diantara aturan tersebut yakni adanya keharusan melaksanakan kepatuhan syariah, terhadap akad yang terdapat dalam produk-produk di lembaga keuangan syariah. Pelaksanaan kepatuhan syariah di LKS harus senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS. Menurut penulis, sejauh ini fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPS di lapangan belum berjalan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidak sesuaian antara aturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di LKS.

Terkait kepatuhan syariah, terdapat peraturan-peraturan yang harus ditaati sebagaimana ditentukan oleh beberapa pihak, diantaranya adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut dengan DSN-MUI. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 26 disebutkan bahwa, kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah, harus tunduk kepada prinsip syariah sebagaimana difatwakan oleh DSN yang kemudian dituangkan dalam PBI.

---

<sup>1</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), vi.

<sup>2</sup> Hamid H.M. Arifin, *Hukum Ekonomi Islam: Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 142.

Dengan demikian, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI harus ditaati, sebagai bentuk ketaatan pada pemimpin. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang memerintahkan kepada umat manusia untuk senantiasa mentaati Allah, Rasul beserta pemimpin.<sup>3</sup>

DSN merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia yang didirikan pada tahun 1997.<sup>4</sup> Diantara kewenangan DSN yaitu, mengawasi produk-produk Lembaga Keuangan Syariah, memberikan fatwa terhadap produk-produk yang akan dikeluarkan dan dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah, mengeluarkan pedoman yang akan digunakan oleh DPS, serta merekomendasikan ulama atau pihak-pihak yang memiliki kredibilitas untuk menjadi anggota DPS.<sup>5</sup> Terkait beberapa tugas tersebut, DSN berhak memberikan teguran kepada LKS yang terbukti melakukan penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan oleh DSN. Hal ini dapat dilihat dari ada atau tidaknya laporan DPS mengenai penyimpangan tersebut.<sup>6</sup>

DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa untuk mengatur keberlangsungan pelaksanaan akad-akad yang terdapat dalam produk Lembaga Keuangan Syariah, yang mana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah termasuk juga di dalamnya. Selanjutnya, agar fatwa-fatwa tersebut dapat berjalan dengan baik, DSN-MUI menunjuk para pihak yang memenuhi kualifikasi, untuk mengawasi pelaksanaan akad yang terdapat pada produk-produk di BPRS. Hal ini dilakukan agar dapat menjaga pelaksanaan kepatuhan syariah suatu produk yang ada di BPRS tersebut.

Pengawasan dilakukan oleh dewan yang ditempatkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Dalam struktur organisasi bank syariah, dewan tersebut dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah. Calon anggota DPS harus mendapat rekomendasi dari DSN terlebih dahulu yang kemudian ditetapkan oleh

<sup>3</sup> Hal ini ditegaskan dalam al-qur'an يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: 4): (59). Mahmud 'Utsman, dkk., *Al-Qur'an Al-Karim Ma'a Tarjamatu Ma'anihi Ila Al-Lughati Al-Indunisiyyah* (Jakarta: Perca, 1982), 88.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 124.

<sup>5</sup> Hijrah Saputra, dkk (ed.), *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), 13. lihat juga Sutedi, *Perbankan Syariah*, 125.

<sup>6</sup> Saputra dkk., (ed.), *Himpunan Fatwa*, 13.

rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kedudukan DPS berada di kantor pusat BPRS terkait. Namun demikian, meskipun DPS berada di kantor pusat, anggota DPS bersifat independen yakni mereka tidak tunduk kepada pimpinan BPRS yang berada di kantor tersebut.

Keberadaan DPS memiliki status hukum yang kuat, hal ini dikarenakan ketentuan mengenai DPS disebut secara langsung dalam pasal 32 Undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut UUPS. Dalam pasal 32 (1) menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. selanjutnya, terkait pengangkatan DPS ditegaskan dalam Pasal 32 (2) yaitu, Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Ketentuan selanjutnya, pada pasal 32 (3) menegaskan tugas DPS yakni memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.<sup>7</sup>

Ketentuan ini merupakan penegasan dan pengulangan terhadap ketentuan sebelumnya, yakni dalam pasal 109 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disebut UUPT.<sup>8</sup> Dalam UUPT pasal 109 (1) menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, pasal 109 (2) menyebutkan bahwa DPS merupakan orang yang ahli di bidang syariah yang diangkat oleh RUPS atau direkomendasikan oleh MUI. Pasal 109 (3) menjelaskan tentang tugas DPS, yaitu memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.<sup>9</sup>

Disamping itu, peraturan tentang BPRS juga telah lebih dahulu mengatur mengenai DPS. Dalam pasal 20 (1) menyebutkan bahwa DPS berfungsi

---

<sup>7</sup> Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah: UU No. 21 Tahun 2008* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 72. Lihat juga Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 52.

<sup>9</sup> Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

mengawasi kegiatan usaha BPRS agar sesuai prinsip syariah. Pasal 20 (2) dalam melaksanakan fungsinya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN.<sup>10</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa setiap bank syariah, BPRS maupun Unit Usaha Syariah wajib membentuk DPS, agar dapat mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada setiap produk yang ada. Penilaian prinsip syariah pada suatu LKS didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sebagai landasan utama. Hal ini merupakan salah satu alasan perlu adanya DPS pada suatu BPRS, yakni sebagai *power of control* terhadap BPRS.

Di antara kewenangan DPS di BPRS yaitu, melakukan pengawasan secara periodik pada BPRS yang berada di bawah pengawasannya. Hasil pengawasan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk kertas kerja, yang mana di dalamnya memuat opini DPS terkait pelaksanaan akad pada produk-produk yang ada di BPRS. Dalam opini yang dikeluarkan, terdapat landasan hukum yang digunakan DPS untuk menilai pemenuhan prinsip syariah pada produk-produk di BPRS tersebut. Dengan demikian, opini syariah merupakan pendapat DPS terkait pelaksanaan kepatuhan syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI yang telah dituangkan dalam PBI, POJK maupun aturan lain, dalam suatu akad yang berlangsung di BPRS, yang kemudian dituangkan dalam kertas kerja hasil pengawasan DPS.

Menurut Sutedi, dalam melaksanakan pengawasan syariah, DPS harus melaksanakan tiga unsur pokok, yaitu:<sup>11</sup>

1. *Ex ante auditing*, yaitu aktivitas pengawasan syariah yang dilakukan dengan cara mengadakan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan moral, yang diambil dengan cara melakukan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen, dan melakukan *review* terhadap semua jenis kontrak yang dibuat manajemen bank syariah dengan semua pihak. Hal ini bertujuan untuk

---

<sup>10</sup> Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang BPRS tgl. 12 Mei 1999. Lihat juga PBI NO. 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 1 (8), lebih tegas lagi dalam pasal 29 (2) mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi: melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS.

<sup>11</sup> Sutedi, *Perbankan Syariah*, 144.

mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah.

2. *Ex post auditing*, yaitu aktifitas pengawasan syariah yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan dan keuangan bank syariah. Hal ini bertujuan menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menghitung pembayaran zakat, yaitu aktifitas pengawasan syariah dalam memeriksa kebenaran dan ketepatan bank syariah terkait perhitungan zakat yang harus dikeluarkan, serta memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sebagaimana dalam ketentuan syariah. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank syariah.

Disamping itu, DPS juga wajib memberikan usulan-usulan untuk pengembangan BPRS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. DPS berwenang untuk melaporkan perkembangan produk dan operasional BPRS yang diawasinya kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya, DPS juga bertugas merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.<sup>12</sup>

Dalam hal pengawasan terhadap pengembangan produk baru dan pengawasan terhadap kegiatan bank syariah, menurut Syafi'i Antonio, DPS memiliki tugas untuk melakukan hal-hal berikut; *pertama*, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip-prinsip syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. *Kedua*, mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang ditentukan dalam fatwa DSN. *Ketiga*, meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru yang akan dikeluarkan oleh bank apabila belum ada fatwanya. *Keempat*, melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan

---

<sup>12</sup> Saputra dkk., (ed.), *Himpunan Fatwa*, 15. Lihat juga Sutedi, *Perbankan Syariah*, 124.

jasa. *Kelima*, meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari kinerja bank dalam melaksanakan tugasnya.<sup>13</sup>

Dengan demikian, keberadaan DPS pada suatu BPRS memiliki peranan penting, yakni sebagai unsur pokok pembeda antara BPR konvensional dengan BPRS, serta untuk memeliharanya prinsip-prinsip syariah pada produk-produk yang ada. Dengan demikian, kepatuhan syariah dalam suatu produk di BPRS dapat terealisasi dengan baik. Oleh karena itu, DPS yang berada di BPRS berkedudukan sebagai penjamin terlaksananya prinsip syariah pada bank tersebut.

Dari sini, dapat terlihat bahwa tugas utama DPS yaitu mengawasi kegiatan usaha BPRS, agar senantiasa berada dalam koridor ketentuan dan prinsip syariah sebagaimana yang telah difatwakan oleh DSN.<sup>14</sup> Hal ini dikarenakan produk-produk atau transaksi yang berlaku di BPRS memiliki ciri khas yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, sehingga membutuhkan aturan yang khusus pula. Dengan demikian, anggota DPS harus benar-benar orang yang mengerti tentang ekonomi syariah beserta prinsip-prinsipnya, bukan sekedar tokoh masyarakat yang dianggap memiliki wibawa. Hal ini untuk menjamin bahwa DPS benar-benar memiliki kualitas intelektual yang memadai terutama di bidang ekonomi syariah, serta hal-hal yang berkaitan dengan operasional perbankan syariah sehingga tugas-tugas sebagai DPS dapat terealisasi dengan baik.

Disamping itu, DPS juga bertugas untuk memberikan rekomendasi mengenai produk-produk baru. Rekomendasi tersebut harus melalui penelitian yang dilakukan oleh DPS terlebih dahulu, sebelum diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN-MUI. Dari sini terlihat bahwa DPS memiliki peranan penting di BPRS, khususnya terkait pengawasan dan perkembangan produk di BPRS itu sendiri dan hukum ekonomi islam pada umumnya. Oleh karenanya, pemilihan dan penentuan anggota DPS harus dilakukan secara selektif dengan standar dan kualifikasi tertentu yang dapat menunjang DPS dalam melaksanakan tugasnya.

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), 31-32.

<sup>14</sup> Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Perannya* (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), 108.



Dari beberapa kewenangan dan tugas-tugas sebagaimana di atas, dapat diketahui bahwa DPS memiliki dua fungsi umum yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam lingkup fungsi internal, DPS berfungsi sebagai pengawas syariah yang mengawasi berjalannya kegiatan lembaga keuangan syariah agar dapat melaksanakan kepatuhan syariah dengan baik. Sedangkan dalam lingkup eksternal, DPS berfungsi menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS.

Dalam organisasi bank syariah, DPS memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: *pertama*, sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. *Kedua*, sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. *Ketiga*, sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di bank syariah.<sup>15</sup>

Menurut Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio bahwa untuk menjamin DPS agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bebas, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu: *pertama*, anggota DPS bukan staf bank. *Kedua*, DPS dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. *Ketiga*, besaran honorarium DPS ditentukan oleh RUPS. *Keempat*, DPS memiliki sistem kerja dan tugas-tugas tertentu sebagaimana badan pengawas lain.<sup>16</sup>

Dari pemaparan di atas, peneliti menganggap perlu adanya penelitian mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi DPS dalam merumuskan opini syariah terkait produk-produk yang terdapat di BPRS Bandung. Serta landasan hukum yang digunakan oleh DPS dalam merumuskan opini-opini tersebut. Hal ini untuk melihat pelaksanaan prinsip syariah pada produk-produk yang ada di BPRS dapat terjaga dan terealisasi dengan baik.

---

<sup>15</sup> Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 30., Lihat juga Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Pranada, 2004), 71.

<sup>16</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Jogjakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), 2-4.

Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam tesis ini akan difokuskan pada **“PERTIMBANGAN *TATHBIQ AL-AHKAM* DALAM OPINI SYARIAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SE-BANDUNG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari paparan latarbelakang di atas, dapat diketahui bahwa DPS berfungsi sebagai pengawas syariah, serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS. Namun demikian, pada kenyataannya fungsi pengawasan tersebut belum terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan akad di lapangan. Seperti dalam pembiayaan *murabahah*. Dalam pelaksanaannya pihak BPRS memberikan dana tunai secara langsung kepada nasabah tanpa ada bukti kuitansi yang jelas, kuitansi tersebut berfungsi sebagai bukti, bahwa nasabah membelanjakan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Dengan demikian, untuk dapat memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan syariah yang dilakukan oleh DPS, maka harus ada landasan hukum serta acuan-acuan yang jelas pada opini syariah yang dikeluarkan oleh DPS, terkait produk-produk yang ada di BPRS. Landasan hukum yang digunakan pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, apabila fungsi pengawasan dapat terealisasi dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap BPRS dapat meningkat.

Dari permasalahan di atas dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan DPS di BPRS Bandung?
2. Bagaimana landasan hukum yang digunakan DPS di BPRS Bandung dalam menggagas opini syariah?
3. Bagaimana pertimbangan DPS di BPRS Bandung dalam menerapkan hukum pada opini syariah?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan DPS di BPRS Bandung;
2. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan DPS di BPRS Bandung dalam mengagasi opini syariahnya;
3. Untuk menjelaskan pertimbangan DPS di BPRS Bandung dalam menerapkan hukum pada opini syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan dari penelitian ini sendiri adalah:

1. Kegunaan akademis, yaitu untuk memberikan sumbangsih dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah khususnya Lembaga Keuangan Syariah, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan DPS di BPRS Bandung, landasan hukum yang digunakannya serta pertimbangan DPS dalam menerapkan hukum pada opini syariahnya;
2. Kegunaan praktis, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dalam mengenali dan memahami pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan DPS di BPRS Bandung, mengetahui landasan hukum yang digunakannya, serta pertimbangan DPS dalam menerapkan hukum pada opini syariahnya. Sehingga mampu memberikan sumbangsih dalam bentuk informasi bagi mahasiswa, praktisi ekonomi syariah, serta rekomendasi maupun pijakan kebijakan terkait opini-opini syariah DPS di BPRS.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai DPS sudah cukup banyak, namun kebanyakan penelitian yang dilakukan belum menyeluruh dalam menggambarkan kondisi riil mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPS serta pembahasan mengenai opini

syariah yang dikeluarkannya. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait pengawasan DPS di LKS.

*Pertama*, tesis yang ditulis oleh Ira Wati Rochaeli, SH dengan judul Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Bank “x” dikaitkan dengan Pelaksanaan *Good Governance Corporate* (GCG). Dalam tulisannya, ia membahas mengenai alasan perlunya pengawasan DPS terhadap kegiatan usaha perbankan syariah serta efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap fungsi DPS sebagai salah satu alat pengawasan di perbankan syariah.<sup>17</sup> Peran DPS sebagai pengawas di Unit Usaha Syariah PT. Bank “x” sangat penting dan perlu dioptimalkan, agar DPS bisa memastikan bahwa segala produk dan sistem operasional yang ada pada Unit Usaha Syariah PT. Bank “x” sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah sebagaimana yang telah ditentukan. Disamping itu, peran dan fungsi DPS sebagai penasehat dan pemberi saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank “x” juga sangat penting dan bernilai positif.<sup>18</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ira Wati Rochaeli di atas, ada beberapa saran yang dikemukakan:

1. Dewan Pengawas Syariah harus mempunyai komitmen untuk meningkatkan ilmu dan ketrampilan, baik melalui media asosiasi profesi (bila nantinya ada) ataupun melalui media lain. Hal ini dapat dilakukan melalui jasa yang umumnya diberikan oleh ikatan profesi. Oleh karena itu adanya ikatan profesi pengawas syariah adalah mutlak adanya khususnya di Indonesia dimana pendidikan khusus profesi ini belum berkembang baik.
2. DPS diharapkan mempunyai waktu yang cukup bagi Unit Usaha Syariah atau industri perbankan syariah yang diawasinya, sehingga pengawasan secara detil dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
3. Secara umum produk syariah yang dijual pada Unit Usaha Syariah PT. Bank “x” merupakan produk lazim dijual di bank syariah lainnya. Adapun

---

<sup>17</sup> Ira Wati Rochaeli, “Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Bank “x” Dikaitkan dengan Pelaksanaan *Good Governance Corporate* (GCG)”, Tesis Magister Kenotariatan, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), 13. t.d.

<sup>18</sup> Rochaeli, “Fungsi dan Peranan”, 66.

hambatan dan kendala yang ada berdasarkan kajian tersebut di atas, merupakan hambatan atau kendala umum yang juga dihadapi oleh bank-bank syariah lainnya. Oleh karena itu perlu dibuat usulan kepada instansi yang berwenang, yaitu antara lain Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pertanahan Nasional, dan instansi terkait lainnya, untuk lebih mengupayakan terbitnya ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur lebih lanjut dan lebih rinci terkait kegiatan bertransaksi secara syariah, sehingga dapat bersinergi dengan hukum syariah yang berlandaskan fatwa-fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, dapat lebih memajukan bisnis dan kinerja bank-bank syariah di Indonesia.<sup>19</sup>

*Kedua*, tesis yang ditulis oleh Abdul Hayyi, dengan judul efektifitas pengawasan bank syariah studi terhadap pengawasan DPS BPR syariah di Kota Mataram. Pembahasan ini dibatasi pada efektifitas pengawasan DPS pada BPR Syariah di Kota Mataram, serta mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan DPS di BPR syariah di kota Mataram. Hasil yang didapatkan adalah pengawasan DPS BPR syariah di Kota Mataram kurang efektif.

Diantara faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan ini adalah intensitas pengawasan yang minim. Hal ini dikarenakan anggota DPS BPR Syariah Patuh Beramal tidak melihat secara langsung pelaksanaa transaksi yang ada. Namun demikian, anggota DPS BPRS Patuh Beramal memiliki kompetensi yang memadai di bidang operasional perbankan syariah, sehingga meskipun pengawasan yang dilakukan minim namun tetap memberikan sumbangan pemikiran terhadap BPRS.<sup>20</sup>

Faktor fasilitas dan honorarium juga mempengaruhi rendahnya efektifitas pengawasan DPS BPR Syariah di Kota Mataram. Hal ini dikarenakan anggota DPS dalam bekerja, berorientasi pada amal ikhlas dan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan perbankan syariah. Faktor lain yang juga mempengaruhi

---

<sup>19</sup> Rochaeli, "Fungsi dan Peranan", 66-67.

<sup>20</sup> Abdul Hayyi, "Efektifitas Pengawasan Bank Syariah Studi Terhadap Pengawasan DPS BPR Syariah di Kota Mataram", *Tesis Pascasarjana Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011), 135. t.d.

efektifitas pengawasan DPS BPRS Patuh Beramal di Kota Mataram yaitu, produk yang tidak variatif. Produk BPRS Patuh Beramal dominan pada pembiayaan *murabahah*, sehingga tidak ada obyek baru bagi DPS untuk melakukan pengawasan. Keberadaan DPS sebagai sekunder, juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan DPS BPRS Patuh Beramal di Kota Mataram. Faktor ini merupakan imbas dari minimnya pengawasan yang dilakukan oleh DPS, sehingga DPS tidak begitu aktif dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, kurangnya koordinasi antara DPS, DSN, dan BI dalam melakukan pengawasan juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengawasan DPS BPRS Patuh Beramal di Kota Mataram.<sup>21</sup>

*Ketiga*, tesis yang ditulis oleh Agus Yudianto, dengan judul Peranan DPS dalam Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Perbankan Syariah di Jawa Barat. Pembahasan pada tesis ini difokuskan pada beberapa aspek, yaitu:<sup>22</sup>

1. Gambaran latar belakang keilmuan DPS di wilayah Jawa Barat, hal ini terkait profesionalisme sebagai DPS.

Kenyataan dilapangan menunjukan bahwa DPS yang diangkat merupakan pihak yang dianggap senior dan cenderung sudah tua yang dianggap memiliki kharisma di masyarakat, sedangkan pihak-pihak yang masih muda dan berkompeten di bidang perbankan syariah dan fiqh muamalah tidak memiliki ruang untuk berkiprah sebagai DPS. Dengan demikian anggota DPS tidak begitu memahami hal-hal yang berkaitan dengan operasional bank syariah. sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPS terkait kepatuhan prinsip syariah tidak berjalan dengan maksimal.

2. Penjelasan mengenai model pengawasan yang diterapkan DPS dalam menerapkan kepatuhan syariah pada perbankan syariah.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPS di wilayah Jawa Barat belum terealisasi dengan baik. Hal ini dikarenakan DPS hanya mengunjungi Bank Syariah yang menjadi tempat bertugas sesekali saja, bahkan beberapa bulan

---

<sup>21</sup> Hayyi, "Efektifitas Pengawasan", 136.

<sup>22</sup> Agus Yudianto, "Peranan DPS dalam Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Perbankan Syariah di Jawa Barat", *Tesis Magister Ekonomi Syariah*, (Cirebon: IAIN Syekh Nur Jati, 2011), 21-25. t.d.

sekali, sehingga pengawasan yang dilakukan belum berjalan maksimal. Bahkan di beberapa bank syariah tidak memberikan meja khusus untuk DPS. Disamping itu, kunjungan DPS ke Bank Syariah juga terkesan hanya sebagai formalitas, sehingga tidak jarang DPS yang datang hanya sekedar datang saja tanpa melihat format akad yang ada, berlangsungnya akad, restrukturisasi maupun kegiatan lain yang memerlukan pengawasan DPS.

3. Kesesuaian kinerja DPS dengan kepatuhan prinsip syariah pada perbankan syariah di wilayah Jawa Barat.

Fungsi pengawasan yang kurang maksimal menyebabkan pelaksanaan kepatuhan syariah di Bank Syariah tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh DPS, serta minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh DPS terkait operasional Bank Syariah, sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan DPS terhadap kepatuhan prinsip syariah pada perbankan syariah di Jawa Barat belum maksimal.<sup>23</sup>

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Akhmad Faozan.<sup>24</sup> Beliau merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam. Dalam tulisannya, ada beberapa poin penting yang dibahas, diantaranya yaitu:

1. Pembahasan terkait peran DPS pada LKS.

DPS memiliki peran untuk mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi utamanya adalah: *pertama*, sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. *Kedua*, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN, dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan

---

<sup>23</sup> Yudiyanto, "Peranan DPS" 25.

<sup>24</sup> Akhmad Faozan, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal el-Jizya* Vol.II No. 1 Januari-Juni 2014.

produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.<sup>25</sup>

2. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prosedur dan penetapan DPS.

DSN telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota DPS pada LKS. Sebagaimana dalam keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03/2000 Bagian Ketiga, yang menjelaskan Syarat Anggota DPS yaitu sebagai berikut: *pertama*, memiliki akhlak karimah. *Kedua*, memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. *Ketiga*, memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah. *Keempat*, memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.<sup>26</sup>

Menurut Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 21 nomor 1-4, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh DPS di bank syariah sebagai berikut: *pertama*, memiliki integritas. Orang yang dianggap memiliki integritas adalah orang yang memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. *Kedua*, memiliki kompetensi. Orang yang dimaksud memiliki kompetensi adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum. *Ketiga*, memiliki reputasi keuangan, yang dimaksud memiliki reputasi keuangan yaitu tidak termasuk dalam kredit pembiayaan macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

---

<sup>25</sup> Faozan, "Optimalisasi", 26.

<sup>26</sup> Faozan, "Optimalisasi", 31-32.



perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.<sup>27</sup>

3. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai problematika DPS, yang meliputi beberapa hal di antaranya yaitu:
  - a. Kelangkaan ulama integratif, agar tugas pengawasan DPS di LKS dapat berjalan dengan optimal, maka DPS harus memenuhi kualifikasi tertentu. Syarat utama yang harus dimiliki oleh anggota DPS adalah penguasaan fiqh muamalah terapan dan penguasaan ilmu ekonomi dan keuangan. Untuk memenuhi kualifikasi di atas, pihak perbankan syariah dan Bank Indonesia mengalami kesulitan, karena langkanya ulama ahli fiqh yang memahami ilmu ekonomi keuangan, khususnya perbankan.
  - b. DPS tidak melakukan pengawasan secara optimal. Hal ini dikarenakan biasanya para anggota yang diangkat sebagai DPS sudah mempunyai kesibukan tertentu di tempat lain. Hal ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak optimal. Dengan demikian DPS hanya dijadikan objek pelengkap pada sebuah institusi perbankan syariah sehingga struktur yang telah ada bisa terisi dengan baik. Di samping itu keterbatasan pengetahuan DPS terkait fiqh muamalah, keuangan dan ekonomi menyebabkan anggota DPS tidak mengetahui apabila terjadi penyimpangan pada LKS yang diawasinya.<sup>28</sup>
4. Pembahasan selanjutnya, dalam jurnal tersebut memberikan beberapa solusi alternatif, diantaranya yaitu:
  - a. Anggota DPS mempunyai kompetensi atau kemampuan dalam bentuk keahlian yang dihasilkan lewat pendidikan formal seperti, ilmu fiqh muamalat, operasional bank, pengawasan dan menguasai administrasi umum. Diharapkan dengan adanya kriteria pertama ini, anggota DPS secara umum harus mempunyai latarbelakang syari'ah khususnya dan keagamaan pada umumnya. Seyogyanya, harus ada pendidikan khusus

---

<sup>27</sup> Faozan, "Optimalisasi", 32-33.

<sup>28</sup> Faozan, "Optimalisasi", 34-35.

yang dapat memberikan otoritas keilmuan dan ketrampilan, atau sedikitnya semacam sertifikasi, sebagaimana halnya dalam profesi akuntan publik.

- b. DPS harus profesional dan bekerja penuh waktu (*full time*).
- c. Anggota DPS mempunyai dan menjadi anggota asosiasi profesi. Sejauh ini belum ada wacana untuk membentuk adanya profesi baru yang semata-mata dapat mengingat anggotanya dalam batasan profesi kepengawasan LKS. Dengan adanya asosiasi profesi DPS, maka asosiasi ini diharapkan dapat menjadi wadah guna meningkatkan kompetensi dan membuat kode etik profesi, sehingga kepercayaan masyarakat kepada DPS dapat terjaga.
- d. Anggota DPS mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas ilmu dan keterampilan, baik melalui media asosiasi (bila nantinya ada) ataupun melalui media lain.
- e. Berani menegur pengelola LKS yang menyimpang.<sup>29</sup>

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Agus Waluyo dengan judul Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke Dalam Hukum Positif. Fokus kajian dalam penelitian ini membahas mengenai bentuk dan model transformasi fatwa DSN ke dalam hukum positif serta tingkat kepatuhan bank syariah terhadap fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.<sup>30</sup> Berdasarkan pasal 7 dan 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, fatwa tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU. Oleh karena itu, fatwa tidak bisa berlaku secara serta merta. Fatwa baru bisa diimplementasikan oleh bank syariah apabila sudah dipositifisasikan menjadi hukum positif.<sup>31</sup>

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 26 disebutkan bahwa, kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah yang difatwakan oleh DSN dan dituangkan dalam PBI. Secara tersirat pasal tersebut mensyaratkan agar fatwa DSN dapat mengikat bank syariah harus

<sup>29</sup> Faozan, "Optimalisasi", 36-37.

<sup>30</sup> Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke Dalam Hukum Positif", (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016), *Jurnal Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* vol.10 no. 2. 520.

<sup>31</sup> Waluyo, "Kepatuhan", 521-523.

terlebih dahulu diserap dan ditransformasikan kedalam perundang-undangan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fatwa DSN baru menjadi peraturan perundang-undangan setelah dituangkan menjadi PBI. Merespon hal tersebut, BI dalam PBI No.10/32/PBI/2008 tentang pembentukan Komite Perbankan Syariah (KPS), menyatakan bahwa KPS bertugas membantu BI dalam menafsirkan fatwa DSN terkait dengan perbankan syariah, dan memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa DSN ke dalam PBI. Dengan dituangkannya fatwa DSN ke dalam PBI, maka kekuatannya tidak hanya mengikat secara moral tapi juga mengikat secara hukum.<sup>32</sup>

Adapun transformasi fatwa DSN kedalam PBI, POJK, maupun SEOJK yang mendorong perkembangan perbankan syariah dapat ditemukan antara lain dalam beberapa aturan: *pertama*, PBI Nomor 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah. *Kedua*, POJK Nomor 24 /POJK.03/2015 tentang produk dan Aktivitas Bank syariah dan unit usaha syariah. *Ketiga*, SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas Bank umum syariah dan unit usaha syariah. Sebagaimana disebutkan di atas, menunjukan bahwa sebagian fatwa DSN ditransformasikan dalam bentuk PBI, POJK, dan SEOJK. Tujuan transformasi tersebut tidak lain agar fatwa dapat mengikat dan dilaksanakan oleh LKS, terutama Bank syariah. Salah satu indikator perkembangan Bank syariah adalah semakin bervariasinya produk perbankan syariah itu sendiri.<sup>33</sup>

Selanjutnya, terkait kepatuhan bank syariah terhadap fatwa DSN dan perundang-undangan, hal tersebut merupakan konsekuensi logis penggunaan pedoman-pedoman yang secara legal formal telah disepakati sebagai pedoman dan menjadi syarat mutlak bagi bank syariah dalam menjalankan usahanya. Komitmen pelaksanaan kepatuhan di bank syariah sebagian telah berjalan efektif dan efisien. Hal ini tercermin pada kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip, budaya, manajemen risiko, dan kode etik. Selain itu juga tercermin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi yang telah melaksanakan

---

<sup>32</sup> Waluyo, "Kepatuhan", 524.

<sup>33</sup> Waluyo, "Kepatuhan", 525-526.

ketentuan sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/ 2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Disamping itu, Bank Syariah juga telah melaksanakan tugas sesuai kebijakan, sistem, dan prosedur kepatuhan bank dan telah melaksanakan sesuai prinsip-prinsip perbankan syariah. Kepatuhan bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan dipandang telah berjalan cukup efektif. Menurut BI, kepatuhan bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam laporan tahunannya. Kepatuhan tersebut juga tercermin dalam susunan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris, seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi, fungsi dan mekanisme kerja masing-masing, rapat-rapat yang dilakukan, serta laporan kinerjanya.<sup>34</sup>

*Keenam*, jurnal yang ditulis oleh Selamat Muliadi<sup>35</sup>. Dalam penelitiannya menitik beratkan pada dua hal:

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta.

Terkait pelaksanaan pengawasan dan pembinaan DPS, anggota Dewan Pengawas Syariah wajib datang ke kantor BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta seminggu sekali. Jadwal kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah ditentukan sendiri oleh anggotanya, sehingga bisa disesuaikan dengan aktivitas dari masing-masing anggota, mengingat anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki aktivitas lain di luar Dewan Pengawas Syariah.

Aktivitas utama yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan komunikasi dengan pihak manajemen BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta. Komunikasi berlangsung dengan menggunakan dua arah, antara manajemen dan anggota Dewan Pengawas Syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah di setiap kedatangannya di kantor BPRS Mitra

---

<sup>34</sup> Waluyo, "Kepatuhan", 527-528.

<sup>35</sup> Selamat Muliadi, *Efektifitas Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan dan Pembinaan Lembaga Keuangan Syariah di Yogyakarta Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta*. Diakses pada <https://dspace.uui.ac.id/>, 07/12/2017, 22:24.

Cahaya Indonesia Yogyakarta akan memanggil pihak manajemen, yang biasanya diwakili oleh kepala bagian operasional bank.<sup>36</sup>

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, anggota Dewan Pengawas Syariah juga membuka diri menerima konsultasi dari staf manajemen. Hal ini biasanya terkait dengan hukum syariah dalam suatu pelaksanaan produk bank, baik yang sudah ada ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional maupun yang belum ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

Anggota Dewan Pengawas Syariah juga melakukan rapat bulanan bersama ketua Dewan Pengawas Syariah berkaitan dengan evaluasi hasil kerja Dewan Pengawas Syariah. Hasil keputusan rapat bulanan ini akan disampaikan pada rapat bulanan dewan Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta. Dalam rapat bulanan ini, Dewan Pengawas Syariah juga akan menyampaikan usulan serta nasehat kepada pimpinan BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta, baik yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah maupun berkaitan dengan manajemen. Hal ini bertujuan untuk perbaikan dan kemajuan dari BPRS Mitra Cahaya Indonesia.

Pada setiap bulan Dewan Pengawas Syariah juga mengadakan pertemuan dengan staf BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta. Pertemuan ini dimulai dengan shalat Zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan penyampaian siraman rohani oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam pertemuan ini juga dilakukan sosialisasi fatwa terbaru Dewan Syariah Nasional, dan dilanjutkan dengan forum tanya jawab mengenai fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut.

Setiap tahun para anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS Mitra Cahaya Indonesia menghadiri pertemuan tahunan anggota Dewan Pengawas Syariah seluruh Indonesia dengan Dewan Syariah Nasional. Pertemuan tahunan ini membahas tentang usulan para anggota Dewan Pengawas Syariah, sosialisasi fatwa terbaru Dewan Syariah Nasional, dan evaluasi kinerja Dewan Pengawas Syariah. Dalam pertemuan ini Dewan Syariah Nasional juga

---

<sup>36</sup> Muliadi, *Efektifitas*, 12.

menyampaikan kepada anggota Dewan Pengawas Syariah untuk peningkatan kinerja Dewan Pengawas Syariah.<sup>37</sup>

2. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Mitra Cahaya Indonesia.

Efektifitas pengawasan setidaknya dapat ditentukan melalui lima hal, yaitu: *pertama*, posisi pengawas yang benar-benar independen. *Kedua*, posisi jabatan pengawas harus lebih tinggi dari yang diawasi. *Ketiga*, terdapat prosedur pengawasan yang baku dan teruji. *Keempat*, pengawas memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. *Kelima*, pengawas memiliki *skill* dan pengetahuan yang memadai. Apabila kelima hal ini terpenuhi, maka suatu pengawasan dapat dinilai efektif.<sup>38</sup>

Dari beberapa hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa ada titik persamaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni sama-sama meneliti tentang pengawasan DPS dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Namun demikian permasalahan utama yang akan dibahas dalam tulisan ini belum pernah diteliti oleh penulis-penulis sebelumnya. Oleh karena itu, kajian dalam tesis ini akan difokuskan pada hasil pengawasan DPS terkait pertimbangan *tathbiq al-ahkam* dalam opini syariah dewan pengawas syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah se-Bandung. Kemudian, opini syariah tersebut akan dikaitkan dengan salah satu teori ekonomi syariah yakni teori pemeliharaan *kemashlahatan*. Hal ini yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sehingga, dapat diketahui bahwa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini belum pernah dilakukan.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada:

1. Masalah penelitian penulis terkait pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan DPS di BPRS Bandung, landasan hukum yang digunakan dalam opini syariah DPS, serta pertimbangan DPS di BPRS Bandung dalam menerapkan hukum pada opini syariah;

---

<sup>37</sup> Muliadi, *Efektifitas*, 13

<sup>38</sup> Muliadi, *Efektifitas*, 17.



2. Analisis terletak pada pertimbangan *tathbiq al-ahkam* dalam opini DPS di BPRS Bandung;
3. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
  - a. kertas kerja yang merupakan hasil pengawasan DPS terhadap kegiatan usaha BPRS;
  - b. kertas kerja pengawasan DPS terhadap pengembangan produk baru BPRS;
  - c. wawancara dengan anggota DPS dan staf lain di BPRS.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab permasalahan dalam kajian ini, akan digunakan beberapa kerangka pemikiran. Pada pertanyaan penelitian yang pertama, analisis menggunakan kerangka pemikiran berupa aturan mengenai tugas dan kewenangan serta fungsi DPS. Kemudian akan dikaitkan dengan faktor-faktor yang menentukan perilaku seseorang. Merujuk pernyataan Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Amiruddin dan Zainal Asikin bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tertentu. *Pertama*, memperhitungkan untung rugi. *Kedua*, menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa. *Ketiga*, sesuai dengan hati nuraninya. *Keempat*, adanya tekanan-tekanan tertentu.<sup>39</sup>

Selanjutnya, faktor-faktor di atas akan dikaitkan dengan teori fungsionalisme struktural Robert K. Merton. Salah satu sumbangan Merton terhadap fungsionalisme struktural adalah analisisnya mengenai hubungan antara kultur, struktur dan anomi. Merton mendefinisikan kultur sebagai seperangkat nilai normatif yang terorganisir, yang menentukan perilaku bersama anggota masyarakat atau anggota kelompok. Struktur sosial diartikan sebagai seperangkat hubungan sosial yang terorganisir, yang dengan berbagai cara melibatkan anggota masyarakat atau kelompok di dalamnya. Anomi terjadi bila ada keterputusan hubungan antara norma kultural dan tujuan dengan kapasitas yang terstruktur

---

<sup>39</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 141.

secara sosial dari anggota kelompok untuk bertindak sesuai dengan nilai kultural. Artinya, karena posisi mereka di dalam struktur sosial masyarakat, beberapa orang tidak mampu bertindak sesuai dengan nilai normatif. Kultur menghendaki tipe perilaku tertentu yang justru dicegah oleh struktur sosial.<sup>40</sup> Teori ini digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan DPS di BPRS Bandung,.

Untuk menjelaskan permasalahan pada poin dua, tulisan ini akan menggunakan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI terkait produk-produk yang ada di BPRS. Seperti fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, fatwa No. 09/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*, fatwa No. 19/DSN-MUI/IV tentang *al-qardh*, fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa dan beberapa fatwa terkait lainnya.

Pembahasan mengenai fatwa-fatwa tersebut digunakan untuk menjelaskan landasan hukum yang digunakan DPS di BPRS Bandung dalam menggagas opini syariah. Sehingga dapat diketahui sumber hukum yang digunakan DPS dalam merumuskan opini syariah, metodologi yang digunakan DPS dalam menetapkan opini syariah, serta produk pemikiran yang dihasilkan oleh DPS di BPRS. Kemudian, untuk melihat pemeliharaan kemashlahatan yang terdapat dalam fatwa dan opini syariah akan digunakan teori pemeliharaan kemashlahatan yang disampaikan oleh Juhaya bahwa *mashlahat* adalah lawan dari *mafsadat*. *Mashlahat* menjadi tujuan syariat islam. Dengan demikian, dimana ada kebaikan, di sana ada syariat Allah SWT.<sup>41</sup>

Beberapa aspek yang menjadi tolak ukur *mashlahat* diantaranya yaitu: *pertama*, *mashlahat* yang terkandung dalam fatwa DSN MUI dan opini syariah DPS tidak bertentangan dengan nash baik al-qur'an maupun hadis. *Kedua*, *mashlahat* tersebut juga harus berlaku umum dan tidak hanya menguntungkan sebagian kelompok saja. *Ketiga*, *mashlahat* tersebut ditentukan oleh para

<sup>40</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terjemahan oleh Alimandan, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2010), 142-143.

<sup>41</sup> Juhaya S. Pradja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 120.

cendekiawan yang benar-benar ahli di bidangnya, dalam hal ini adalah cendekiawan yang ahli dalam bidang fiqh muamalah dan perbankan syariah.

Kemashlahatan merupakan tujuan hukum islam. Hal ini banyak diisyaratkan dalam Ayat-ayat al-qur'an,<sup>42</sup> dengan demikian secara umum tujuan hukum islam adalah tercapainya kemaslahatan dan kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat dengan cara mengambil sesuatu yang bermanfaat dan menolak *mudharat*.<sup>43</sup> Segala sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan maupun sesuatu yang dilarang, semua itu bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan.

Tujuan ini memberikan pengertian bahwa hukum Islam merupakan rahmat Allah bagi manusia, bahkan bagi seluruh alam. Oleh karenanya, perwujudan rahmat bisa terealisasi apabila hukum Islam benar-benar menghadirkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia.<sup>44</sup>

*Mashlahat* pada umumnya merupakan sesuatu yang nisbi, karena banyak *mashlahat* yang di dalamnya terkandung unsur *mafsadat*. Begitu juga sebaliknya, banyak *mafsadat* yang mengandung unsur *mashlahat*. Akan tetapi, sisi yang diambil adalah panduan mengenai *mashlahat* yang diterima oleh syariat islam yang disimpulkan dalam beberapa kaidah fikihnya. Diantara kaidah fikih yang digunakan para ulama terkait kemaslahatan yaitu kaidah yang menyatakan "Dilarang menyebabkan *kemadharatan* dan dilarang membalas *kemadharatan* dengan sejenisnya".<sup>45</sup> Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat islam menghendaki adanya keadilan sehingga tidak boleh ada pihak yang dirugikan satu sama lain.

Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai *dharar* dan *dhirar*. Pendapat pertama sebagaimana dikemukakan oleh Al-Husaini, *al-dharar* diartikan dengan "bagimu ada manfaat tapi bagi orang lain ada *mudharat*". Sedangkan *al-*

<sup>42</sup> Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah (5): 5-6; QS. Yunus (10): 57-58, 108; QS. Al-An'am (6): 104.

<sup>43</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 143.

<sup>44</sup> Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, 143.

<sup>45</sup> S. Pradja, *Teori Hukum*, 120. Kaidah tersebut berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas sebagaimana dikutip A. Djazuli لا ضرر ولا ضرار "tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan". Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 68.

*dhirar* diartikan dengan “bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain *memudharatkan*”. Pendapat kedua mengartikan *al-dharar* dengan membuat *kemudharatan* dan *al-dhirar* diartikan dengan membawa *kemudharatan* di luar ketentuan syariah.<sup>46</sup>

Kaidah ini melahirkan konsekuensi hukum sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Larangan penipuan, pemalsuan dan ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi jual beli karena bisa menimbulkan *kemadharatan* yang dimulai oleh penjual dan menimbulkan kerugian dan kesusahaan kepada pihak pembeli.
2. Larangan kepada orang yang tidak sempurna akalnya (*safih*) untuk membelanjakan hartanya. Larangan kepada *al-Mufti al-Majin* untuk tidak memberikan fatwa kepada orang, larangan terhadap tabib yang *jahil*, karena semua orang tersebut dapat menimbulkan *kemadharatan* dan kesusahan terhadap orang lain.
3. Pemberian hak *Syuf'ah* untuk partner dan tetangga demi mencegah timbulnya kesusahan dan kesukaran oleh pembeli ataupun partner baru.
4. Larangan bagi seseorang merusak barang orang lain, walaupun pemilik barang tersebut telah merusak barangnya yang sama.

Kemashlahatan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: *mashlahat* yang bersifat primer, sekunder dan tersier. *Pertama*, kemashlahatan yang bersifat primer atau *al-dharuriyah* yaitu sesuatu yang harus ada demi terpeliharanya kebaikan di dunia dan di akhirat, apabila sesuatu tersebut tidak ada maka kebaikan akan sirna. Kemashlahatan yang bersifat primer berlaku di bidang ibadah, adat, mu'amalah dan *jinayah*, yang terkumpul dalam lima bentuk pemeliharaan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan, dan memelihara akal pikiran.<sup>48</sup>

*Kedua*, *al-hajiyat* yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghilangkan kesulitan dan kepicikan. Apabila hal-hal yang termasuk dalam *mashlahat al-hajiyat* tidak ada dalam masyarakat, maka tidak menjadikan rusaknya kehidupan, akan tetapi dapat mendatangkan kesulitan, kesempitan, dan

<sup>46</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 68-69.

<sup>47</sup> S. Pradja, *Teori Hukum*, 121.

<sup>48</sup> Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, 144.

kepicikan. *Mashlahat al-hajiyat* berlaku di berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, adat, *mu'amalat* dan *jinayah*. Khusus di bidang muamalah, seperti dikatakan oleh al-syatibi, *hajiyat* terkait dengan masalah-masalah seperti dalam jual beli *al-salam*, *al-murabahat*, *al-istisna*, *al-musaqat*, dan yang lainnya.<sup>49</sup>

Ketiga, *mashlahat al-tahsiniyat* yaitu mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Hal ini berhubungan dengan *makarim al-akhlaq* dan berlaku di bidang ibadat, *adat*, muamalah dan *al-'uqubat*. Dalam bidang muamalah, umpamanya larangan menjual barang yang najis. Hal ini terkait langsung antara pemilahan tujuan hukum Islam berdasarkan sifatnya berdasarkan UU No.21 terutama di bidang muamalah.<sup>50</sup>

Dari pengelompokan *mashlahat* di atas, maka dapat dipahami sebagai berikut, mencari rizki termasuk *mashlahat al-dharuriyat* yang merujuk kepada memelihara keturunan dan harta. Cara mencari nafkah termasuk dalam *mashlahat al-hajiyat* yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk jual beli (*salam*, *murabahat*, *istisnai*), *wadi'ah*, *musyarakah*, *ijarah*, *qardh*, *wakalah*, wakaf dan *mudharabah*. Hal inilah yang kemudian dijadikan pedoman oleh perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha. Sebagaimana dalam UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (20) s/ (25); Pasal 4 ayat (3); Pasal 19 ayat (1) huruf a, b, c, f, e, g, i dan n; Pasal 19 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan I; dan Pasal 21 huruf a nomor 1 dan 2; huruf b angka 1 sampai 4; dan huruf d.<sup>51</sup>

Perwujudan *mashlahat* yang bersifat *hajiyat* di ranah ekonomi perbankan syariah seperti digambarkan diatas bertujuan untuk memelihara harta agar terjaga kehalalan dan kesuciannya sehingga keturunan terpelihara dari mengkonsumsi barang yang haram. Hal ini karena ragam *hajiyat* di ranah ekonomi perbankan syariah merupakan bagian dari prinsip hukum Islam bidang muamalah, yang bertujuan meraih kebaikan dan kemashlahatan masyarakat. Lebih jauh lagi, hukum islam menyempurnakan ragam *hajiyat* disini dengan *akhlaq* yang mulia yang merupakan bagian tujuan hukum islam yang bersifat *tahsiniyat*.<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, 144.

<sup>50</sup> Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, 144.

<sup>51</sup> Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, 144.

<sup>52</sup> Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, 145.

Penjelasan pada poin tiga akan dikaitkan dengan teori *tathbiq al-ahkam*, Hal ini untuk menjelaskan pertimbangan apa saja yang digunakan DPS dalam menerapkan hukum pada opini syariahnya.

Dalam menerapkan hukum, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan seperti, aspek yuridis, aspek filosofis serta aspek sosiologis. Dengan demikian, apabila ketiga aspek tersebut dipertimbangkan dengan baik diharapkan kemashlahatan yang terdapat dalam opini syariah DPS di BPRS Bandung dapat terealisasi dengan baik.

Dari kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, dapat penulis gambarkan sebagai berikut:



#### G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

##### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*), dimana hukum dikonsepsikan sebagai gejala sosial yang bersifat empiris, yang dikaji sebagai variabel bebas atau sebab (*independent variable*) yang memberikan pengaruh serta akibat, pada berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Asikin, *Pengantar Metode*. 133.



Penelitian hukum sosiologis memiliki beberapa karakteristik yaitu, *Pertama*, data awal yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis adalah data sekunder, sebagaimana dalam penelitian hukum normatif. Namun, dalam penelitian hukum sosiologis data sekunder tersebut kemudian dilanjutkan dengan data lapangan sebagai data primer. *Kedua*, definisi operasional dapat diambil dari peraturan undang-undang, terlebih dalam penelitian yang mengkaji efektifitas suatu undang-undang. *Ketiga*, dalam penelitian hukum sosiologis terkadang membutuhkan hipotesis. *Keempat*, alat pengumpul data berupa studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku hukum masyarakat, dan wawancara digunakan untuk penelitian yang bertujuan mengetahui persepsi, kepercayaan, motifasi, informasi yang sifatnya sangat pribadi. *Kelima*, melakukan penetapan sampling. *Keenam*, pengolahan data dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>54</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kegunaan dari penelitian hukum sosiologis yaitu, untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law inforcement*). Hal ini dikarenakan penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>55</sup>

Selanjutnya, hukum sosiologis berdasarkan tujuannya dapat dibedakan menjadi beberapa macam sebagaimana berikut: *Pertama*, penelitian berlakunya hukum. Berlakunya hukum dapat dilihat dari beberapa perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis dan sosiologis. Suatu kaidah hukum dikatakan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap keberhasilan dalam mengatur sikap atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Pengaruh yang

---

<sup>54</sup> Asikin, *Pengantar Metode*, 133-134. Lihat juga Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2015), 88-90.

<sup>55</sup> Asikin, *Pengantar Metode*. 135.

dihasilkan bisa positif yang kemudian disebut efektifitas, dan bisa juga negatif atau disebut dengan dampak.<sup>56</sup>

Tesis ini menggunakan jenis penelitian efektifitas hukum. Penelitian efektifitas hukum, pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Menurut Donald Black sebagaimana dikutip oleh Asikin bahwa ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim. Ideal hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang kemudian dituangkan dalam beberapa aturan yang memiliki kekuatan hukum seperti, PBI, SEBI maupun POJK terkait ketentuan-ketentuan akad pada produk di BPRS, serta aturan mengenai tugas, fungsi dan kewenangan DPS. Sedangkan realitas hukum menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Asikin yaitu, orang seharusnya bertindak laku atau bersikap sesuai dengan kaidah hukum atau disebut juga hukum dalam tindakan.<sup>57</sup> Realitas hukum dalam penelitian ini yakni pelaksanaan akad pada produk-produk di BPRS yang kemudian dapat dilihat dalam hasil pengawasan DPS terhadap kegiatan usaha BPRS, sebagaimana tertuang dalam kertas kerja DPS di BPRS.

Dalam penelitian efektifitas hukum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: *pertama*, perilaku yang diamati adalah perilaku nyata. *Kedua*, adanya perbandingan antara perilaku yang diatur dalam hukum dengan keadaan jika perilaku tidak diatur dalam hukum. *Ketiga*, mempertimbangkan jangka waktu pengamatan. *Keempat*, mempertimbangkan tingkat kesadaran pelaku. Menurut Berl Kutschinsky sebagaimana dikutip Asikin ada empat indikator kesadaran hukum. *Pertama*, pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum. *Kedua*, pengetahuan tentang isi peraturan hukum. *Ketiga*, sikap hukum. *Keempat*, perilaku hukum.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Asikin, *Pengantar Metode*. 135. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), 51.

<sup>57</sup> Asikin, *Pengantar Metode*, 137. Lihat juga Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 50.

<sup>58</sup> Asikin, *Pengantar Metode*, 138-139. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, tt.)

Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk dalam penelitian evaluatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai program-program yang dijalankan.<sup>59</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menilai program pengawasan yang dilakukan DPS di BPRS. Penelitian evaluatif<sup>60</sup>, menurut Arikunto yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan.

Penelitian ini untuk melihat kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi harapan yang dinyatakan dalam kriteria. Dalam penelitian ini, kriteria atau tolak ukur yang digunakan adalah peraturan terkait fungsi, kewenangan dan tugas pengawasan DPS, serta fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Hal ini untuk mengetahui kesenjangan antara peraturan yang termuat dalam ketentuan DSN MUI dan aturan-aturan terkait tugas dan wewenang DPS dengan kondisi nyata mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPS di BPRS Bandung. Serta mengetahui kesesuaian antara fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terkait produk-produk di BPRS dengan landasan hukum yang digunakan dalam opini syariah DPS sebagaimana yang tertuang dalam kertas kerja.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland sebagaimana dikutip Moleong, yang dimaksud dengan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan, seperti dokumen dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai menjadi sumber data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan, merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 10.

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, cet. Ke-14, (Jakarta: rineka cipta, 2010), 36.

<sup>61</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 157.

<sup>62</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 157-158.

Pada penelitian ini akan dikelompokkan menjadi dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam bentuk kata-kata dan tindakan pada penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa pihak seperti anggota DPS BPRS Al-Ma'soem, anggota DPS BPRS Amanah Rabbaniah, anggota DPS BPRS HIK Parahyangan, DPS Biturrahman Pusaka dan staf pegawai BPRS Al-Ihsan.

Sumber data kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sumber data sekunder yang berupa sumber tertulis. Menurut Moleong, sumber tertulis dapat dikelompokkan kepada sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.<sup>63</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Musyarakah*
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa
- g. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh*
- h. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*
- i. Kertas kerja Pengawas Terhadap Kegiatan Usaha BPRS Semester II 2015 PT. BPRS AL-IHSAN Baleendah Bandung

---

<sup>63</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 159.

- j. Kertas kerja Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha BPRS Semester I Tahun 2014 PT. BPRS AMANAH RABBANIAH
  - k. Kertas kerja Pengawasan Terhadap Proses Pengembangan Produk Baru Bank Semester II Tahun 2013 BPRS PNM AL-MASOEM
  - l. Kertas kerja pengawasan Terhadap Pengembangan Produk dan Aktifitas Baru Semester II Tahun 2017 PT. BPRS Baiturridha Pusaka
  - m. Kertas kerja pengawasan Terhadap Kegiatan Bank Semester II Tahun 2017 PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Masoem
  - n. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
  - o. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/Dpbs terkait pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027)
  - p. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbs 27 juni 2013
  - q. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
  - r. Serta buku-buku dan sumber data lainnya.
3. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data pada penelitian melibatkan empat jenis strategi<sup>64</sup> sebagaimana berikut:
- a. Observasi
- Dalam observasi, peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktifitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi di BPRS Gotong Royong dengan terlibat langsung sebagai nasabah. Observasi ini digunakan penulis untuk mendapatkan data awal dalam penelitian ini. Di samping itu, penulis juga melakukan observasi langsung ke BPRS HIK Parahyangan Pusat,

---

<sup>64</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terjemah oleh. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 267-270.

BPRS Al-Ihsan, BPRS Al-Masoem, BPRS Amanah Rabbaniah dan BPRS Baiturridha Pusaka. Observasi dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan semistruktur terkait tata cara pengawasan yang dilakukan oleh DPS, serta produk-produk yang ada pada masing-masing BPRS.

b. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan dengan cara berhadap-hadapan. Teknik ini digunakan dalam wawancara dengan beberapa pihak terkait, diantaranya yaitu: *pertama*, salah satu anggota DPS BPRS HIK Parahyangan yang bertempat di ruangan wakil rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Kedua*, wawancara dengan salah satu anggota DPS BPRS Al-Masoem bertempat di kantor pusat BPRS Al-Masoem. *Ketiga*, wawancara dengan bagian marketing pembiayaan murabahah di BPRS Gotong Royong. *Keempat*, wawancara dengan salah satu staf BPRS Al-Ihsan. *Kelima*, wawancara dengan salah satu anggota DPS BPRS Amanah Rabbaniah. *Keenam*, wawancara dengan DPS BPRS Baiturridha Pusaka. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi serta keterangan langsung terkait permasalahan yang diteliti yakni mengenai sumber hukum dalam menentukan opini syariah, beserta opini syariah DPS terkait pemeliharaan prinsip syariah pada produk-produk yang ada di BPRS.

c. Dokumen-Dokumen

Dokumen ini bisa berupa dokumen publik seperti koran, makalah, laporan kantor. Dapat juga berupa dokumen privat seperti buku harian, diary, surat, dan e-mail.

Dalam penelitian ini dokumen yang diteliti oleh penulis berupa laporan kantor yakni, kertas kerja DPS terkait laporan mengenai kegiatan usaha BPRS, yang mana di dalamnya terdapat penjelasan mengenai pelaksanaan akad-akad pada produk yang ada pada masing-masing BPRS. Dokumen yang dapat penulis kumpulkan diantaranya: *pertama*, Kertas Kerja Pengawas Terhadap Kegiatan Usaha BPRS Semester II 2015 PT. BPRS Al-Ihsan Baleendah Bandung. *Kedua*, Kertas Kerja Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha BPRS Semester I Tahun 2014 PT. BPRS Amanah



Rabbaniah. *Ketiga*, Kertas Kerja Pengawasan Terhadap Proses Pengembangan Produk Baru Bank Semester II Tahun 2013 BPRS PNM Al-Masoem. *Keempat*, Kertas kerja pengawasan Terhadap Pengembangan Produk dan Aktifitas Baru Semester II Tahun 2017 PT. BPRS Baiturridha Pusaka. *Kelima*, Kertas kerja pengawasan Terhadap Kegiatan Bank Semester II Tahun 2017 PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Masoem

d. Materi audio dan visual

Data ini dapat berupa foto-foto, objek seni, atau segala jenis suara atau bunyi. Data yang berupa materi audio dan visual tidak diperoleh dalam penelitian ini, hal ini dikarenakan dalam proses wawancara tidak didukung dengan rekaman baik berupa audio maupun visual.

4. Prosedur Analisis Data

Secara garis besar, kegiatan analisis mencakup tiga tahapan yaitu, persiapan, tabulasi, penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian.<sup>65</sup> Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan adalah pengecekan kelengkapan data. Selanjutnya, pada tahap tabulasi, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan skor untuk angket, memberikan kode-kode tertentu, mengubah atau memodifikasi jenis data yang telah diperoleh dengan teknis analisis yang digunakan.<sup>66</sup>

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Bambang Waluyo sebagaimana dikutip oleh Suratman, analisis kualitatif dapat dilakukan apabila terdapat beberapa ciri sebagai berikut. *Pertama*, data yang terkumpul tidak berupa angka-angka. *Kedua*, data tersebut sulit untuk diukur dengan angka. *Ketiga*, hubungan antar variabel tidak jelas. *Keempat*, sampel lebih bersifat non probabilitas. *Kelima*, pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan. *Keenam*, penggunaan teori kurang diperlukan.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 278.

<sup>66</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 279-280.

<sup>67</sup> Dillah, *Metode Penelitian*, 145.

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran serta memahaminya secara utuh, dan memahami hal-hal yang melatarbelakanginya,<sup>68</sup> serta menganalisis hasil studi dokumentasi ke dalam bentuk gambaran permasalahan dengan metode deduktif-induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh dan sistematis.<sup>69</sup>

#### 5. Prosedur dan Teknik Pemeriksaan Uji Keabsahan Data

Prosedur penelitian dalam tulisan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan (BAB I) yang terdiri dari hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan dalam pembahasan penulis, pentingnya topik penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan langkah-langkah penelitian. Bagian ini sebagai arahan dan acuan kerangka penelitian serta pertanggung jawaban penelitian.

Sebelum menjelaskan hasil pengawasan DPS di BPRS yang tertuang dalam opini syariah, maka pada BAB II akan dijabarkan terlebih dahulu mengenai tugas dan wewenang DPS berdasarkan UUPS, fatwa dan ketentuan DSN-MUI serta PBI/POJK maupun SEBI terkait. Kemudian dilanjutkan dengan penjabaran mengenai aktifitas pengawasan yang dilakukan oleh DPS di BPRS yang selanjutnya dikaitkan dengan faktor-faktor yang menentukan perilaku seseorang, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Amiruddin dan Zainal Asikin. Selanjutnya, faktor-faktor di atas akan dikaitkan dengan teori fungsionalisme struktural Robert K. Merton. Hal ini untuk menjelaskan pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan DPS di BPRS Bandung.

---

<sup>68</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 250.

<sup>69</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 10.

Pada BAB III akan dijelaskan mengenai fatwa-fatwa DSN-MUI terkait akad-akad yang digunakan dalam produk-produk yang terdapat di BPRS. Kemudian dikaitkan dengan opini syariah DPS di BPRS berdasarkan kertas kerja hasil dari pengawasan DPS di BPRS. Hal ini untuk mengetahui pelaksanaan kepatuhan syariah terhadap fatwa tersebut terkait pelaksanaan akad yang berlangsung di BPRS. Selanjutnya, untuk mengetahui terpeliharanya kemashlahatan yang terdapat dalam fatwa DSN MUI dan opini syariah DPS, tulisan ini menggunakan konsep *nadzariyyat al-mashlahah*.

Pada BAB IV dilanjutkan dengan analisis terkait pertimbangan DPS di BPRS Bandung dalam menerapkan hukum pada opini syariah berdasarkan konsep *tathbiq al-ahkam*. Pembahasan penelitian dituangkan dalam bentuk analisis terhadap data yang ditemukan di lapangan berupa opini syariah DPS di BPRS Bandung terkait produk-produk yang ada di BPRS Bandung, yang memuat pertimbangan hukum di dalamnya.

Akhirnya, pada BAB V penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dari penelitian dan saran berikut rekomendasi yang dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan.